

ABSTRAK

Ada 2 (dua) macam akta otentik yang pembuatannya menjadi wewenang Notaris, yaitu Akta pejabat, atau disebut juga ambtelijke akte, atau dikenal pula sebagai relaas akte (selanjutnya akan ditulis : relaas akte), yaitu akta otentik yang dibuat oleh (door de) Notaris. Misal : untuk memperoleh bukti bahwa penarikan undian sudah dilakukan secara jujur (fair), atau, untuk membuktikan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (disingkat RUPS) telah mengambil keputusan tertentu, dan Akta pihak, atau disebut partij akte (selanjutnya akan ditulis : partij akte), yaitu akta otentik yang dibuat di hadapan (ten overstan) Notaris. Misal : untuk membuktikan bahwa antara penjual dan pembeli sudah terdapat kesepakatan jual beli. Apabila suatu akta telah memperoleh otentisitas (derajat otentik), maka akta tersebut akan secara otomatis menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang bersangkutan, bagi pihak-pihak yang mendapat hak darinya, maupun bagi Notaris sendiri. Akta Notaris tidak akan memperoleh otentisitas apabila disusun tanpa memenuhi syarat-syarat (formalitas) tersebut. Terdapat kemungkinan bahwa apa yang oleh pejabat umum dicatat sebagai benar (dan kemudian dituangkan dalam akta-akta) itu ternyata terbukti tidak benar (palsu). Di sinilah Notaris harus berhati-hati, karena risiko pidananya tidak ringan. Secara umum delik keterangan palsu diatur dalam KUHP, yaitu dalam Pasal 266 KUHP. Tak jarang Notaris dilibatkan sebagai pihak tergugat dan atau dijadikan tersangka dalam perkara-perkara yang bersumber pada dugaan adanya perbuatan pidana memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik. Padahal sebenarnya, dalam kasus seperti itu Notaris tidak selalu harus dilibatkan sebagai pihak tergugat dan atau pihak tersangka. Jika demikian faktanya, maka yang perlu dikaji secara lebih mendalam adalah sejauh mana batas-batas tanggung jawab Notaris apabila terdapat keterangan palsu yang terbukti masuk ke dalam akta otentik. Untuk menghindari risiko yang dapat timbul sebagai akibat penempatan keterangan palsu oleh para pihak/penghadap, maka Notaris harus paham berbagai peraturan perundang-undangan (ketentuan-ketentuan hukum formil maupun materiil) yang berlaku, sehingga mampu menangkap dan menyaring isi, keterangan, pernyataan-pernyataan, dan atau perbuatan hukum yang oleh para pihak/penghadap akan dinyatakan dalam bagian isi akta. Apabila terdapat indikasi bahwa keterangan yang diberikan para pihak/penghadap itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau palsu (bertentangan dengan fakta yang benar) maka Notaris dapat sedini mungkin menolak. Segala apa yang kemudian dituangkan ke dalam partij akte tersebut, tetap merupakan keinginan, kehendak, serta permintaan dari (dan dengan demikian merupakan perbuatannya) para pihak/penghadap sendiri. Bukan keinginan, kehendak, serta permintaan atau perbuatan Notaris. Notaris berada di luar para pihak dalam akta, dan sama sekali bukan serta tidak menjadi pihak dalam akta yang dibuat di hadapannya. Bilamana mengenai isi dari suatu partij akte ternyata kemudian terjadi perselisihan di antara para pihak/penghadap, maka semua itu merupakan persoalan di antara para pihak/penghadap sendiri. Begitu pula jika terdapat indikasi bahwa ada di antara mereka itu telah memasukkan keterangan palsu pada partij akte, maka tidak tepat apabila kemudian Notarisnya diminta pertanggungjawaban. Bahkan juga tidak sejalan dengan karakter yuridis partij akte, apabila dalam hal sedemikian itu Notaris dijadikan tersangka, terdakwa, bahkan terdakwa dalam perkara pidana, atau ditempatkan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara perdata.

ABSTRACT

There are two (2) kinds of authentic act of making the authority of the notary, the officials Deed, also called *ambtelijke* certificate, or also known as *relaas* certificate (hereinafter to be written : *relaas* certificate), which is made by authentic act (*door de*) Notary. For example : to obtain evidence that the draw has been done honestly (fair), or, to prove that the General Meeting of Shareholders Interns (abbreviated GMS) has taken certain decisions, and the Deed, or so-called *Partij* certificate (hereinafter to be written : *Partij* certificate), that authentic deed made before (ten overstan) Notary. For example: to prove that the seller and buyer are there purchase agreement . Where a deed has gained authenticity (authentic degree), then the deed will be automatically ensure legal certainty and to provide legal protection to the concerned parties, for the parties who have the right of it, and for the Notary himself. Deed will not gain authenticity when compiled without fulfilling the conditions (formality) is. There is a possibility that what the public official is recorded as true (and later stated in the deed) that proved untrue (false) . This is where the notary must be careful, because the light is not criminal risk. In general offense of false information provided for in the Criminal Code, namely in Article 266 of the Criminal Code. Not infrequently notary involved as a defendant and or been charged in those cases that stem from an alleged criminal act to enter false information in an authentic deed. When in fact, in such cases Notary does not always have to be involved as a party defendant and or the suspect. If such facts, then that needs to be studied in greater depth is the extent to which the limits of liability if there is a Notary demonstrably false information into an authentic deed .

To avoid the risks that may arise as a result of the placement of false information by the parties, the notary must understand the various laws and regulations (the provisions of formal and substantive law) in force, so as to capture and filter the content, information, statements, and or legal action by the parties be expressed in the contents section deed. If there are indications that the testimony of the parties was contrary to the laws in force and or false (despite the fact that right) as early as possible then the notary can refuse .

All that is then poured into the deed *Partij*, remains the desire, the will, as well as requests from (and thus the actions) of the parties . Not the desire, the will, as well as requests or notary deed. Notaries are beyond the parties to the deed, and not at all and is not a party to the deed made in front of him. When the contents of a deed turns ensued *Partij* dispute between the parties, then all it is a matter between the parties. Similarly, if there is an indication that any of them had been put false information on *Partij* deed, it is not appropriate if the notary then held accountable. Not even in line with the character of juridical *Partij* deed, if in such a case the notary as a suspect, defendant, even defendants in a criminal case, or placed as a Defendant or Co-defendant in a civil case.